KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus Pelindo II Tinggal Ketok Palu: Sikat Mafia Pelabuhan Butuh Suntikan Presiden
Tanggal : Sabtu, 19 September 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pansus Pelindo II Tinggal Ketok Palu

Sikat Mafia Pelabuhan Butuh Suntikan Presiden

Pembentukan Panitia Khusus atau Pansus untuk menyelidiki dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II hanya menunggu waktu. Tinggal ketok palu di sidang paripurna. Semua fraksi dan sejumlah komisi DPR setuju mengusut dugaan ketidakberesan di perusahaan plat merah yang dipimpin RJ Lino itu.

AWAL pekan depan, pimpinan Komisi III DPR mengundang pimpinan Komisi V, VI, IX, dan XI DPR, untuk membahas pembentukan Pansus Pelindo II. Pimpinan lima alat kelengkapan Dewan itu akan membahasnya pada forum rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Informasi ini disampaikan Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yang juga salah seorang inisiator pembentukan Pansus Pelindo II.

Dia mengingatkan, pembentukan Pansus Pelindo II telah diputuskan pada rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Badrotin Haiti, pekan lalu. Atas dasar itu, merujuk ketentuan Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan Komisi III DPR bersama pimpinan komisi-komisi lain akan membahas pembentukan Pansus Pelindo II di forum Badan Musyawarah DPR.

Hasil rapat Badan Musyawarah DPR akan dibacakan dan diputuskan pada rapat paripurna DPR mendatang. "Semua fraksi partai politik di DPR sudah sepakat, ya pembentukan Pansus Pelindo II tinggal ketok palu," kata Masinton.

Dia menambahkan, banyak anggota DPR dari Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, Hanura, PKB, PKS, dan Fraksi PPP sudah setuju. "Bahkan, semua fraksi parpol di Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui pembentukan Pansus Pelindo II," kata Masinton di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Masinton menambahkan, draft usulan pembentukan Pansus Pelindo II sudah disiapkan untuk dibahas pada rapat Badan Musyawarah DPR. Intinya, Pansus Pelindo II yang akan dibentuk DPR mau membongkar dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Pelindo II. Di antaranya, soal indikasi konspirasi pada perpanjangan kontrak PT JICT atau Jakarta International Container Terminal, salah satu anak perusahaan Pelindo II.

"Tapi nggak etis kalau kita buka sekarang, kita tunggu pembahasan Badan Musyawarah DPR dulu. Sedikit bocoran saja, Pelindo II dikelola seperti perusahaan sendiri. Banyak kesalahan yang dilakukan, tapi tak ada tindakan. Kami menduga Kementerian BUMN melindungi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Pelindo II. Malah ada dugaan kuat, keluarga salah satu menteri terlibat konspirasi perpanjangan kontrak PT JICT," pungkas Masinton.

Pakar komunikasi politik Prof Tjipta Lesmana saat menjadi pembicara diskusi di Pers Room DPR mengajak media massa mendukung dan mengawasi pembentukan Pansus Pelindo II oleh DPR, jangan sampai 'masuk angin'. Tjipta menengarai kasus Pelindo II lebih dahsyat daripada skandal Bank Century.

"Nuansa permainannya mudah terbaca. Cuma sayangnya, anggota DPR yang mengemban tugas dan fungsi pengawasan, selama ini diam saja seperti kambing congek," sesalnya.

Bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang ikut diskusi tersebut mengatakan, mafia pelabuhan Tanjung Priok merupakan bahaya laten dan kronis, butuh *political will* Presiden Joko Widodo untuk membasminya.

Dia mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi di Tanjung Priok beberapa waktu lalu, tidak punya arti apa-apa alias tidak ngefek, meskipun sempat marah dan mengancam akan memecat siapa saja yang terlibat kasus dwelling time.

Fuad menggambarkan kuatnya jaringan mafia pelabuhan. Setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Priok, Bareskrim Polri diturunkan ke sana untuk memerangi mafia pelabuhan. Namun, setelah kantor Pelindo II digeledah polisi, Komjen Budi Waseso dipindahkan dari Kabareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Sekarang, kata Fuad, rakyat sedang menunggu, apakah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli –yang kini perang terbuka dengan Dirut Pelindo II, RJ Lino, red- akan jadi tumbal seperti Komjen Budi Waseso?

"Saya sudah berpesan kepada Rizal Ramli agar hati-hati, karena saya mendengar desas-desus, dia akan dipolisikan," kata Fuad.

"Bagi saya pribadi, kalau pengusutan kasus Pelindo II ini gagal seperti kasus BLBI dan kasus Century, maka negeri ini memang negeri mafia. Saya meragukan proses politik DPR. Tapi kalau nanti jadi dibentuk, saya berharap, Pansus Pelindo II tidak 'masuk angin'," kata Fuad Bawazier. ■ HPS